

Budaya dan Pembangunan Desa dalam Kawasan Khusus (Studi Kasus Pembangunan Desa Pasir Panjang Pulau Rinca)

Ratnasari Fajariya Abidin dan Abdul Mujib

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: ratnasari.mb@uin-suka.ac.id

Abstrak: Taman Nasional Komodo, merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengelolaan Pariwisata Nasional Indonesia. Pengembangan dalam pengelolaan destinasi menjadi sebuah yang tak terhindarkan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata, telah mencanangkan TNK menjadi salah satu destinasi pariwisata eksklusif. Pengembangan dan pengelolaannya dilakukan oleh satu Otoritas, tugas badan otoritas ini adalah merancang dan mengembangkan pariwisata di kawasan ini. Pembangunan membutuhkan satu strategi agar bisa berjalan dengan lancar dan sukses, terutama bila pembangunan tersebut bersentuhan dengan masyarakat desa. Persoalan masyarakat lokal dalam sebuah program pembangunan menjadi persoalan yang pelik apabila salah dalam pilihan strateginya. Untuk itu perlu ada satu nilai yang dikembangkan dalam perancangan program-program pembangunan. Bagi masyarakat pulau dengan tingkat homogenitas kultur akan sangat kuat untuk mempertahankan budayanya. Untuk kelompok-seperti ini dibutuhkan kemampuan khusus yang mengikut sertakan komponen masyarakat dalam perancangan dan eksekusi program pembangunan.

Kata Kunci: *budaya; pembangunan desa; Taman Nasional Komodo*

Pendahuluan

Pulau Rinca menjadi bagian penting dari pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) Komodo. Posisi Pulau Rinca yang berdekatan dengan Pulau Komodo dan keberadaan Komodo di Pulau ini, menjadikan Pulau Rinca bagian yang penting dalam pengelolaan TNK. Pulau Rinca yang secara administratif berda dalam Wilayah Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo, yang dihuni oleh sekitar 1.557 Kepala atau sekitar 386 Kepala Keluarga¹. Selama ini Pulau

¹ Data diambil dari hasil Wawancara Dengan Bpk H. Mukhtar Kepala Desa Pari Panjang, Pada Tanggal 25 September 2019 di Kampung Rinca Pulau Rinca. Data sudah disinkronkan dengan hasil wawancara dengan Kaur

Rinca menjadi penopang bahkan menjadi penyangga utama dari Pengelolaan Pariwisata di TNK selain Pulau Komodo.

Komodo sebagai bagian dari destinasi wisata dunia, daya tarik objek wisata Indonesia memukau para pelancong dari berbagai belahan dunia. Data Badan Pusat statistik menunjukkan secara akumulatif tidak kurang 4.577.510² orang wisatawan asing telah berkunjung ke Indonesia dalam rentang waktu tahun 2015, 35% adalah wisatawan yang berkunjung ke TNK. Industri pariwisata di tanah air telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya industri-industri pendukung pariwisata, seperti sektor akomodasi, restoran dan fasilitas publik lainnya.³ Perkembangan pariwisata semestinya dapat memberikan kontribusi positif pada kertilbatan masyarakat, lebih khusus yang berdampak kepada perbaikan ekonomi masyarakat..

Pembangunan merupakan proses *sustainable development* sebagai suatu perubahan yang di dalamnya pemanfaatan sumber daya, investasi, pengembangan teknologi, dan restrukturisasi kelembagaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.⁴

Pembangunan kesejahteraan masyarakat sejatinya adalah melakukan pemberda yaan dan meminimalkan angka kemiskinan dalam masyarakat.⁵ Perberdayaan masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan perubahan sosial baik pada tingkat lokal maupun global. Karena ketidak berdayaan masyarakat akan menghambat kemampuan suatu bangsa menghadapi persaingan global. Pemberdayaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pedoman umum program pemberdayaan mayarakat, menganut prinsip demokrasi, keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, mencerminkan kebutuhan masyarakat

Pemerintahan Kantor Kecamatan Komodo, Pada Tanggal 26 September 2019 di Labuan Bajo.

² Berita Resmi Statistik No.58 /09/Th.XV, 3 September 2015.

³ Yusak Anshari, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal 1. Lihat juga Prof. Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 5

⁴ Drajat Tri Kartono, Modul Teori dan Konsep Pembangunan

⁵ Soeharto Edy, *Memabangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), p. 16

yang sesungguhnya, keterlibatan perempuan, kesinambungan, dan partisipasi masyarakat.⁶

Program pembangunan terutama bagi kepentingan pengembangan pariwisata TNK, hingga akhir 2017 pembangunan terkesan sangat stagnan bahkan cenderung tidak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam lingkup masyarakat Pulau Rinca. Keterlibatan masyarakat sangat rendah, bahkan motivasi masyarakat sangat rendah untuk mengolah lebih besar potensi lokal yang ada, lebih khusus lagi untuk ikut serta mendukung perkembangan program pariwisata yang sedang gencar dikembangkan di Manggarai Barat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dan diuji, tidak hanya pada program pembangunan semata, akan tetapi juga pada aspek partisipasi komunitas dalam pembangunan di wilayah pedesaan, dengan beberapa alasan; **Alasan Pertama**, Program pembangunan pedesaan menjadi bagian penting dalam seluruh program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. **Alasan Kedua**, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan menjadi tolak ukur penting keberhasilan sebuah proses pembangunan di pedesaan, bahwa pendekatan dalam pembangunan desa adalah Desa Membangun dan Membangun Desa, maka mencermati keterlibatan masyarakat ini dalam rangka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengupayakan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan penting dari pembangunan. **Alasan Ketiga**, dari program pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan yang melibatkan masyarakat, perlu dilihat potensi nilai dan budaya lokal sebagai motor penggerak dalam upaya pembangunan masyarakat khususnya di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana gambaran keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat? Mengapa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Rendah? Serta Apa saja faktor yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam

⁶ Team Penyusunan, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta; BAPENAS, 2001)

pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?.

Sesuai dengan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian yakni memberikan diskripsi mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, menjelaskan alasan-alasan yang melatar belakangi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan menjelaskan beberapa faktor mendukung keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Pada umumnya Pemerintah, dalam mencanangkan pembangunan lebih cenderung eksklusif dan top down, sehingga memberikan kesan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih cenderung tidak berpihak kepada masyarakat di mana pembangunan itu dilaksanakan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya akses yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung pada wilayah-wilayah lokal. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi seluruh masyarakat untuk secara sukarela menyumbangkan tenaga dan fikiran dalam sebuah proses pembangunan. Partisipasi perlu lebih diperjelas sebagai upaya pemerataan keterlibatan masyarakat, baik fisik, materiil, maupun moril dalam pembangunan. Woolock dan Narayan, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam komunitas. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari solidaritas dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat.⁷

⁷ M. Woolock dan D. Narayan, “ Social Capital: Implelntation of Development Theory Research dan Policy” dalam *Jurnal Research and Observer*, Vol1 5 No. 2 Tahun 2000, p. 225-250.

Secara umum terkait dengan pemberdayaan masyarakat, penelitian dan tulisan terkait dengan topik ini telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sedangkan khusus yang berkenaan langsung dengan aspek gerakan perempuan dari kelompok keagamaan masih sangat jarang. Salah satu yang berdekatan adalah apa yang pernah dilakukan dan ditulis oleh Khumaidi (staf Pengajar pada Balai Diklat Depdagri Malang). Khumaidi melakukan kajian terkait dengan Peran Organisasi Keagamaan dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Perempuan Berbasis Modal Sosial, kajian ini melihat seberapa besar peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada kelompok perempuan dan modal sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa PKMAS Perempuan memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, namun dalam penelitian ini tidak ditemukan kesimpulan mengenai posisi agama dalam pemberdayaan masyarakat.⁸

Selain itu beberapa penelitian yang terkait dengan program pembangunan masyarakat juga pernah dilakukan oleh Abdul Mujib dkk, kajian yang dilakukan adalah melihat seberapa Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Masjid di Wilayah Perkotaan Yogyakarta Bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kajian dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) ini mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui kesamaan tujuan dan pandangan keagamaan dengan pendekatan lembaga keagamaan yaitu masjid, dalam konteks kelembagaan inilah masyarakat dapat mengambil peranan yang cukup besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.⁹

Penelitian yang terkait langsung dengan Partisipasi masyarakat yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Andriani dkk dengan judul ; Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang

⁸ Khumaidi, "Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Perempuan berbasis Modal Sosial", dalam Jurnal MUWAZAH Vol 3 No, 1 Tahun 2011, p. 373-384

⁹ Abdul Mujib dkk, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Melalui Masjid Masjid Di Wilayah Perkotaan Yogyakarta Bagi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" Laporan Penelitian 2010. Tidak diterbitkan

Mongondow. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif memberikan kesimpulan peran masyarakat telah diberikan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi. Namun kesempatan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akibat keanganan dan keterbatasan kemampuan dari masyarakat.¹⁰

Dari pelacakan dan penkajian yang telah dilakukan di atas, belum ditemukan kajian dan penelitian yang terkait dengan partisipasi masyarakat desa Rinca Manggarai Barat NTT tidak ditemukan.. Hasil penelitian ini menjadi penting khususnya untuk mendapatkan pola dan pendekatan dalam pembangunan untuk meminimalisir terjadinya resistensi dari masyarakat di mana pembangunan direncanakan.

Secara khusus kajian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, di mana kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Sebagai salah satu contoh dalam paradigma baru ini adalah bahwa komponen kesempatan kerja harus mengembangkan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi penduduk lokal.¹¹ Dari kerangka teori ini, pembangunan daerah harus tunduk dan berdiri di atas kondisi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat akan semakin besar karena didukung oleh kondisi dan lokalitas masyarakat.

Sebagai sebuah kajian pembangunan masyarakat, maka penelitian ini juga menggunakan teori Community Development, di mana titik tumpu pembangunan adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi ujung tombak, community-base service (Self reliance). Fokus pembangunan adalah internal masyarakat atau lingkungan komunitas. Kesadaran dalam keikutsertaan masyarakat mendukung perubahan struktur. Keterlibatan dan keikutsertaan pihak profesional dan prakarsa pihak luar komunitas akan sangat mendukung partisipasi publik dalam pembangunan.¹² Sejalan dengan

¹⁰ Ni Made Ayu Andriani dkk, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow" Laporan Penelitian, tidak diterbitkan

¹¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999, p. 302

¹² Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development; Community-Base Alternatives in an Age of Globalisation.*, edisi terjemahan oleh Sastrawan Manulang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 464

tujuan dari penelitian ini, maka kontribusi dari penelitian ini memberikan kontribusi data terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pedesaan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi strategis bagi pengambil kebijakan khususnya terkait dengan pendekatan dalam pembangunan dan keterlibatan masyarakat guna memberikan hasil pembangunan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Secara umum penelitian ini menfokuskan pada program-program serta proses pelaksanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT.. Fokus penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan program-program serta proses pembangunan desa di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT, alasan-alasan yang melatar belakangi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembanguan di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, faktor-faktor mendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi kasus tetpancang atau *embanded case study*, penggunaan studi kasus terpancang ini dipilih mengingat bahwa fokus penelitian telah ditentukan di awal.¹³ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan tingkat pertumbuhan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam konteks pengembangan distinasi wisata TNK. Pembangunan distinasi pariwisata TNK belum mampu menggerakkan masyarakat khususnya Desa yang berada di Pulau Rinca untuk berpartisipasi secara intens dalam pembangunan.

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini, maka sumber datanya adalah sebagai berikut; informan, informan awal dipilih secara purposive atas dasar pada subyek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan judul, permasalahan, maupun fokus dari penelitian,

¹³ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Metod*, (London ; Sago Publication, 1987),

informan selanjutnya didasarkan atas *snow ball sampling*, dan informan selanjutnya didasarkan pada tingkat kejenuhan dari informasi, dengan kata lain apabila tidak ada lagi variasi informasi yang diberikan oleh informan. Informan awal dari penelitian ini adalah dan tokoh masyarakat di mana lokasi penelitian ini dilakukan. Tempat dan peristiwa, meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan lingkungan dan alam. Keadaan sosial dan budaya maupun perilaku dan kejadian yang berkaitan dengan fokus dari penelitian ini. Dokumen yang terkait dengan fokus dan persoalan yang diteliti.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga cara, ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi yang benar.
2. Observasi, observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai social setting masyarakat di mana penelitian ini dilakukan. Dengan demikian diperoleh gambaran yang akan melengkapi diskripsi fokus kajian. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
3. Studi dokumentasi, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip, dan berbagai laporan mengenai program-program pembangunan dan keterlibatan masyarakat.

Data dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan ketika di lapangan maupun setelah data terkumpul. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah agar sistematis. Olahan dilakukan dengan menuliskan wawancara, hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, dan mereduksi, menyajikan data dan menyimpulkan data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis data interaktif. Proses analisis ini secara singkat akan mengikuti tahapan sebagai berikut; data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan secara bersamaan dalam melakukan pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah proses penarikan kesimpulan,

dilakukan setelah proses pengumpulan data., yakni dilakukan setelah proses pengumpulan data, disajikan, didiskripsikan dan kemudiandiberi pemaknaan dengan interpretasi logis. Dengan proses ini sasaran akhirnya adalah untuk mendapatkan sejumlah makna.

Hasil dan Pembahasan

Prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir hingga pada tahun 2020 yang akan datang adalah pariwisata. Pariwisata menjadi prioritas paling utama, terutama infrastruktur pendukung pariwisata. Beberapa tahun sebelumnya pembangunan Kabupaten Manggarai Barat terkonsentrasi pada infrastruktur pendukung industri pariwisata. Secara umum, pembagunan terkonsentrasi pada pengembangan bangunan fisik yang mendukung pariwisata dan kerangka aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata, khususnya TNK.

TKN menjadi salah satu program andalan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Bart dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dari betapa total upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Propinsi maupun Kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah Pemekaran tersebut. Sehingga pada periode ini pembangunan SDM dan masyarakat belum menjadi perhatian Pemerintah daerah.

Pembangunan dan pengembangan objek pariwisata TNK pada tahun 2017, tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada keterlibatan masyarakat yang berada dalam wilayah TNK. Hal ini cukup beralasan, karena konsentrasi pembangunan dan pengembangan baru diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung secara langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di TNK. Pada Tahun ini jumlah total PAD Kabupaten Manggarai Barat masih sangat kecil, sehingga konsentrasi investasi dan pembangunan yang dilakukan adalah terkait dengan upaya peningkatan PAD secara langsung.

Pulau Rinca pada tahun ini belum, belum terlalu banyak tersentuh oleh pembangunan, kondisi fasilitas dan sarana publik masih sangat minim. Pulau ini pada tahun 2017 belum dialiri listrik PLN, ada listrik akan tetapi suadaya masyarakat dalam bentuk Jen-set dengan kapasitas tenaga yang sangat tidak memadai. Di pulau ini

hanya ada dua lembaga pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Mengah Tingkat Pertama.¹⁴ Partisipasi dan keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Pulau Rinca sangatlah rendah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh masarakat secara suadaya adalah tenag listrik dan pemeliharaan lingkunagn melalui pembuatan jalan kampung dan suplay air bersih.¹⁵

Kabupaten Mangarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada sejak tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus Kape, tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963 aspirasi untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk Kabupaten Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal melalui lembaga politik partai Katolik Subkomisariat Manggarai. Pada tahun 1982 Manggarai Barat diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-1355 tanggal 11 november 1982.

Melalui proses pengkajian yang matang dengan memperhatikan potensi dan luas wilayah serta kebutuhan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 aspirasi dan keinginan masyarakat Manggarai Barat mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat maka Kabupaten Manggarai Barat resmi terbentuk.

¹⁴ Wawancara dengan Bpk Mustamin Tokoh Masyarakat Pulau Rinca, pada taggal 24 September 2109 di Rinca.

¹⁵ Wawancara dengan Bpk H. Mukhtar Kepala Desa Pasir Panjang di Pulau Rinca, pada tanggal 25 September 2019

Pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas menjalankan pemerintahan serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah definitif. Dan selanjutnya melalui proses demokrasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch. Dula kemudian diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang pertama.

Dan pada tahun 2010, dilangsungkan proses pilkada yang kedua. Dari proses ini Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drs. Maximus Gasa menjadi Bupati dan wakil Bupati yang kedua. Pada awal berdirinya terbagi atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar dan pada tahun 2011 dimekarkan menjadi 10 kecamatan dengan tambahan wilayah pemekaran yakni Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling dan Kecamatan Ndosu.

Pada tahun 2015, dilangsungkan proses pilkada yang ketiga. Dari proses ini Drs. Agustinus CH. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang ketiga. Pada Tahun 2017 jumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat bertambah menjadi 12 kecamatan. Kecamatan baru hasil pemekaran yang ditetapkan melalui Perda No.14 dan No-15 Tahun 2017 adalah Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat terletak di antara 080 14' – 090 00' Lintang Selatan (LS) dan 1190 21'–1200 20' Bujur Timur (BT).

Keadaan topografi Kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl sebanyak 23 %, 100 – 500 m dpl sebanyak 47 %, 500 – 1000 m dpl sebanyak 25 % dan lebih dari 100 m dpl sebanyak 3 %. Lebih dari 75 % ketinggian di atas 100 m dpl, kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 % dan di atas 40 %. Namun

secara umum wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi berbukit-bukit hingga pegunungan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km², yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah administrasi kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan yakni kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar.

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Manggarai Barat dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan terjadinya musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Walaupun demikian, mengingat Manggarai Barat dan NTT umumnya dekat dengan Australia arus angin mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Manggarai Barat kandungan airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Manggarai Barat lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia.

Hal ini menjadikan Manggarai Barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lainnya relatif rendah. Secara umum iklimnya bertipe tropic kering/semi arid dengan curah hujan yang tidak merata.

| Kecamatan | Tingkat Kemiringan Tanah | | | | | | | | Luas Total (Ha) |
|--------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 0-2 % | | 2-15 % | | 15-40 % | | >40 % | | |
| | Luas | % | Luas | % | Luas | % | Luas | % | |
| 010 Komodo | 3 750 | 1.27 | 9 037 | 3.07 | 54 170 | 18.38 | 9 372 | 3.18 | 76 329 |
| 011 Boleng | 2 029 | 0.69 | 7 009 | 2.38 | 29 397 | 9.97 | 7 216 | 2.45 | 45 651 |
| 020 Sano Nggoang | - | - | 5 565 | 1.89 | 36 221 | 12.29 | 13 732 | 4.66 | 55 518 |
| 021 Mbeliling | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| 030 Lembor | 2 906 | 0.99 | 20 761 | 7.04 | 11 502 | 3.9 | 4 382 | 1.49 | 39 551 |
| 031 Welak | 1 997 | 0.68 | 14 840 | 5.03 | 9 515 | 3.23 | 3 596 | 1.22 | 29 948 |
| 032 Lembor Selatan | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| 040 Kunvas | - | - | - | - | 10 212 | 3.46 | 10 632 | 3.61 | 20 844 |
| 041 Ndozo | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) | *) |
| 050 Macang Pacar | 1 135 | 0.39 | 1 593 | 0.54 | 10 657 | 3.62 | 13 570 | 4.59 | 26 905 |
| Jumlah | 11 817 | 4.01 | 58 805 | 19.95 | 161 674 | 54.85 | 62 450 | 21.19 | 294 746 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat

Ket. *) data masih tergebuang dengan kecamatan induknya

Pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, sebagai kabupaten baru, maka pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia menjadi program prioritas. Pada rentang 2015 hingga 2019 pembangunan sarana dan prasarana fisik diarahkan untuk prioritas yang mendukung kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada orientasi ini, pergerakan pembangunan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pembangunan Bandar Udara Internasional Komodo, Proyek bandara ini berada pada Bandar Udara Komodo terletak di Labuan Bajo ibukota kabupaten Manggarai Barat NTT. Secara Administratif berbatasan dengan : sebelah selatan dengan Laut Sawu, sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah barat dengan Laut Sape dan sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Manggarai.

Pembangunan Bandara Internasional Komodo merupakan upaya prioritas dalam rangka mendukung kemajuan industri pariwisata, mengingat komodo sebagai salah satu daya tarik wisata dunia. Untuk itu pembangunan yang mendukung PAD ini menjadi prioritas utama. Demikian juga pembangunan sarana pendukung, seperti sarana dan akses jalan. Secara umum capaian dari pembangunan fisik secara keseluruhan menunjukkan progres yang nyata. Saat ini sedang berlangsung adalah pemabngunan dan pengembangan pelabuahn. Pengembangan Pelabuhan adalah diarahkan kepda pembangunan pelabuhan Peti Kemas. Dari pembangunan pelabuhan Peti Kemas ini diharapkan akan mampu

mendongkarak akang pemabngunan ekonomi dan berefek kepada peningkatan pendapatan asli daerah melalui peabihan ini.

Selama rentang waktu 2018 hingga pertengahan tahun 2019 angka perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini selanjutnya berdampak kepada program pembangunan di Kabupaten paling barat dari Propinsi Nusa Tenggara Timur ini. Anggaran belanja daerah yang terus ditingkatkan dan skala prioritas pengembangan dan pembangunan daerah yang terus diperkuat, khususnya untuk menggerakkan grafik kunjungan wisatawan di TNK. Salah satunya adalah bagaimana daerah-daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Pariwisata TNK. Desa Pasair Panjang yang berada di Pulau Rinca mendapatkan porsi yang cukup lumayan dengan pengembangan Pelabuhan Penyebrangan, sebagai pintu masuk pulau. Fasilitas Tenaga Listrik yang Cukup memadai bagi masyarakat pulau.

Pada tahap pembangunan periode ini, keikut sertaan masyarakat meningkat sangat tajam, program-program yang diupayakan adalah berdasarkan musyawarah masyarakat. Musyawarah dilakukan secara hirarkis, yang dimulai dengan kelompok masyarakat terbatas, kemudian dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) samapai kepada kelompok lebih besar yaitu musyawarah Desa. Program-program yang ingin dilakukan dan menjadi prioritas dibahas dalam sedemikian rupa. Hampir smua komponen masyarakat turut andil dalam program-program. Hasilnya menjadi sangat luar biasa, pola yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Pasar Panjang dalam mengikut sertakan masyarakat dalam disain pembangunan Desa sangat efektif.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, Pertama; rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah program-program yang dicanangkan tidak sesuai dengan keadaan, kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Pola penyusunan program yang tidak memperhatikan nilai-nilai yang umum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan sangat terkait dengan stategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa. Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keikut sertaan masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Ketiga, memberikan akses langsung kepada masyarakat terhdap hasil-hasil pembangunan memberikan dampak

yang cukup besar terhadap keikutsertaan dampak pembangunan dalam wilayah desa.

Kesimpulan

Prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa tahun terakhir hingga pada tahun 2020 yang akan datang adalah pariwisata. Pariwisata menjadi prioritas paling utama, terutama infrastruktur pendukung pariwisata. Beberapa tahun sebelumnya pembangunan Kabupaten Manggarai Barat terkonsentrasi pada infrastruktur pendukung industri pariwisata. Secara umum, pembangunan terkonsentrasi pada pengembangan bangunan fisik yang mendukung pariwisata dan kerangka aturan yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata, khususnya TNK.

TKN menjadi salah satu program andalan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat dari betapa total upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Propinsi maupun Kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah Pemekaran tersebut. Sehingga pada periode ini pembangunan SDM dan masyarakat belum menjadi perhatian Pemerintah daerah.

Pembangunan dan pengembangan objek pariwisata TNK pada tahun 2017, tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada keterlibatan masyarakat yang berada dalam wilayah TNK. Hal ini cukup beralasan, karena konsentrasi pembangunan dan pengembangan baru diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung secara langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di TNK. Pada Tahun ini jumlah total PAD Kabupaten Manggarai Barat masih sangat kecil, sehingga konsentrasi investasi dan pembangunan yang dilakukan adalah terkait dengan upaya peningkatan PAD secara langsung.

Pulau Rinca pada tahun ini belum, belum terlalu banyak tersentuh oleh pembangunan, kondisi fasilitas dan sarana publik masih sangat minim. Pulau ini pada tahun 2017 belum dialiri listrik PLN, ada listrik akan tetapi suadaya masyarakat dalam bentuk Jen-set dengan kapasitas tenaga yang sangat tidak memadai. Di pulau ini hanya ada dua lembaga pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar dan

Sekolah Mengah Tingkat Pertama.¹⁶ Partisipasi dan keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan desa di Pulau Rinca sangatlah rendah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh masarakat secara suadaya adalah tenag listrik dan pemeliharaan lingkunagn melalui pembuatan jalan kampung dan suplay air bersih.¹⁷

Selama rentang waktu 2018 hingga pertengahan tahun 2019 angka perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan ini selanjutnya berdampak kepada program pembangunan di Kabupaten paling barat dari Propinsi Nusa Tenggara Timur ini. Anggaran belanja daerah yang terus ditingkatkan dan skala prioritas pengembangan dan pembangunan daerah yang terus diperkuat, khususnya untuk menggerakkan grafik kunjungan wisatawan di TNK. Salah satunya adalah bagaimana daerah-daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan Pariwisata TNK. Desa Pasair Panjang yang berada di Pulau Rinca mendapatkan porsi yang cukup lumayan dengan pengembangan Pelabuhan Penyebrangan, sebagai pintu masuk pulau. Fasilitas Tenaga Listri yang Cukup memadai bagi masyarakat pulau.

Pada tahap pembagunan periode ini, keikut sertaan masyarakat meningkat sangat tajam, program-program yang diupayakan adalah berdasarkan musyawarah masyarakat. Musyawarah dilakukan secara hirarkis, yang dimulai dengan kelompok masyarakat terbatas, kemudian dalam lingkup Rukun Tetangga (RT) samapai kepada kelompok lebih besar yaitu musyawarah Desa. Program-program yang ingin dilakukan dan menjadi prioritas dibahas dalam sedemikian rupa. Hampir smua komponen masyarakat turut andil dalam program-program. Hasilnya menjadi sangat luar biasa, pola yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Pasar Panjang dalam mengikut sertakan masyarakat dalam disain pembangunan Desa sangat efektif.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, Pertama; rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah program-program yang dicanangkan tidak sesuai dengan keadaan, kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Pola penyusunan program

¹⁶ Wawancara dengan Bpk Mustamin Tokoh Masyarakat Pulau Rinca, pada taggal 24 September 2109 di Rinca.

¹⁷ Wawancara dengan Bpk H. Mukhtar Kepala Desa Pasir Panjang di Pulau Rinca, pada tanggal 25 September 2019

yang tidak memperhatikan nilai-nilai yang umum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan sangat terkait dengan strategi yang dikembangkan oleh pemerintah desa. Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program-program pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan desa. Ketiga, memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan memberikan dampak yang cukup besar terhadap keikutsertaan dampak pembangunan dalam wilayah desa.

Rekomendasi

Agar tercipta iklim pembangunan yang mengarah kepada capaian, maka perlu upaya untuk mempertegas budaya dan tradisi masyarakat lokal, selanjutnya menjadikan budaya sebagai bagian dalam segala bentuk pembangunan dan pengambilan kebijakan skala lokal maupun nasional. Di samping itu memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menginisiasi program-program pembangunan.

Perlu upaya bersama, baik pemerintah daerah maupun kelembagaan terutama Otoritas Pengembangan Pariwisata Pulau Komodo secara bersama-sama melakukan upaya yang serius dalam mengembangkan pariwisata umum dengan memberikan ruang bagi masuknya budaya dan tradisi lokal dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Komodo di Kabupaten Manggarai Barat NTT.

Daftar Pustaka

- Anshari, Yusak, *Manajemen Strategi Hotel (Strategi Meningkatkan Inovasi dan Kinerja)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), hal 1.
Lihat juga Prof. Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007).

- Choakaew, S. , Chan, O., Chartarawat, J., Spriprasert, P., & Nimpaya, S., “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country”, *Jurnal Of Economics Business and Management* 3(7) 739-741. Doi:10.7763/JOEBM, 2015.V3.277.
- Jaelani, Aan. “Halal Tourism Industry in Indonesia”, dalam *Munich Personal PePec Archive MOPA*, www.Ideas.repec.org/f/pja475
- Leksono, Sony. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta; Rajawali Press, 2013)
- Mujib, Abdul, “Analisis Terhadap Konsepsi Syariah Pada Industri Perhotelan di Indonesia”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* edisi Desember 2016
- , “Dinamika hukum dan Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Sanga Semarang Jawa Tengah* Edisi 2014
- , “Interpretasi Norma Fiqh Pada Produk Perbankan Syariah Indonesia”, dalam *Preceding Book International Conference on Muamalat and Islamic Finance*, Selangor: UKM, 2009
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013. Tentang Standar Usaha Perhotelan
- Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI., Nomor PM.106/PW.0066/MPEK/2011 Tentang
- Berita Resmi Statistik No.58 /09/Th.XV, 3 September 2015
- Jan Hendrick Peters dkk, *Hospitality in Motion State The Art on Service Management*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Drajat Tri Kartono, Modul Teori dan Konsep Pembangunan
- Soeharto Edy, *Memabangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005).
- Team Penyusunan, *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta; BAPENAS, 2001).
- M. Woolock dan D. Narayan, “ Social Capital: ImpleIntation of Development Theory Research dan Policy” dalam

Jurnal Research and Observer, Vol 5, No. 2 Tahun 2000.

Humaidi, “Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Perempuan berbasis Modal Sosial”, dalam Jurnal MUWAZAH Vol 3 No, 1 Tahun 2011.

Ni Made Ayu Andriani dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow” Laporan Penelitian, tidak diterbitkan.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999.

Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Method*, London: Sago Publication, 1987.